# YouTube Perluas Fitur Hapus Deepfake bagi Tokoh Publik

Category: TEKNOLOGI
written by Redaksi | March 11, 2026




Menanggapi ancaman manipulasi digital yang kian canggih, YouTube resmi memperluas jangkauan alat deteksi kemiripan berbasis AI (AI likeness detection tool). Fitur ini kini memungkinkan kandidat politik, pejabat pemerintah, hingga jurnalis untuk mengajukan penghapusan video deepfake yang menyalahgunakan wajah atau identitas mereka di platform tersebut.

Langkah ini merupakan evolusi dari alat yang diperkenalkan tahun lalu di YouTube Studio, bertujuan untuk memberikan kendali lebih besar kepada figur publik atas representasi digital mereka di tengah banjir konten buatan kecerdasan buatan.

## Mekanisme Verifikasi dan Deteksi Konten

Untuk mengakses program ini, pengguna yang memenuhi kriteria seperti pemilik atau pengelola kanal YouTube harus melewati

proses verifikasi identitas yang ketat. Prosedur ini melibatkan pengunggahan tanda pengenal resmi pemerintah (ID) dan video selfie singkat sebagai data referensi.

Setelah terverifikasi, sistem YouTube akan secara otomatis memindai seluruh platform untuk mencari video yang menampilkan kemiripan wajah pengguna tersebut. Hasil temuan akan muncul di bawah tab “Content Detection” di YouTube Studio. Pengguna diberikan otoritas untuk meninjau setiap video dan mengajukan permohonan penghapusan jika konten tersebut dianggap manipulatif atau merugikan.

## Keseimbangan Antara Perlindungan dan Kebebasan Berpendapat

Meskipun fitur ini memberikan perlindungan tambahan, YouTube menegaskan bahwa tidak semua video akan diturunkan secara otomatis. Perusahaan tetap berkomitmen menjaga pilar kebebasan berekspresi, terutama untuk konten yang bersifat parodi atau satir.

“Kami akan terus mengevaluasi pengecualian ini secara cermat, bahkan jika konten tersebut mengkritik pemimpin dunia atau tokoh berpengaruh, selama masih dalam koridor ekspresi kreatif yang sah,” ungkap pihak YouTube dalam pernyataan resminya. Saat ini, akses awal diberikan kepada “kelompok pilot” yang terdiri dari sejumlah jurnalis dan pejabat pemerintah yang tidak disebutkan namanya.

## Belajar dari Dinamika Politik Global

Urgensi pengembangan alat ini tidak lepas dari rentetan insiden selama Pemilu Presiden AS 2024. Kala itu, laporan mengenai campur tangan pihak asing melalui video deepfake mantan Wapres Kamala Harris sempat mengguncang opini publik. Selain itu, munculnya dukungan selebritas palsu bagi kandidat Donald Trump semakin mempertegas betapa bahayanya manipulasi AI jika tidak diregulasi.

YouTube mengakui bahwa deteksi teknologi saja tidak akan cukup untuk membendung arus deepfake. Oleh karena itu, raksasa video ini menyatakan dukungannya terhadap NO FAKES Act, sebuah rancangan undang-undang yang mewajibkan platform daring menghapus replika digital tanpa izin berdasarkan permintaan pemegang hak cipta atau subjek terkait.

Melalui inisiatif ini, YouTube berharap dapat menciptakan ekosistem informasi yang lebih sehat dan transparan, sekaligus melindungi integritas para jurnalis dan pejabat publik dari kampanye disinformasi yang merusak.